

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian ini maka penulis mendapat kesimpulan :

1. Total realisasi pendapatan daerah dari tahun 2010-2015 selalu meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 15,65%. Pemerintah daerah juga mampu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 29,79%. Pendapatan Transfer/dana perimbangan juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,76%. Namun secara total nilai pendapatan daerah masih didominasi oleh nilai pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Total realisasi belanja daerah dari tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,66%. Realisasi belanja terbesar berasal dari belanja operasi. Hal ini menunjukkan bahwa beban operasional pelaksanaan pemerintahan yang menjadi beban rutin pemerintah daerah masih terlalu besar. Anggaran sebagian besar digunakan untuk membiayai beban rutin pemerintah daerah.
3. Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menambah ruang gerak pembiayaan pemerintah terutama dalam rangka melakukan percepatan pembangunan terutama dalam hal infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar.

4. Dilihat dari 4 aspek keuangan yang menjadi kriteria persyaratan penerbitan obligasi daerah berdasarkan PMK Nomor 111 tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggung Jawaban Obligasi Daerah, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini WTP atas audit

Laporan Keuangannya selama 3 tahun berturut. Hal ini menunjukkan baiknya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi harus memperoleh opini WDP atau WTP atas audit Laporan Keuangannya selama 3 tahun kebelakang.

b. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum pernah melakukan pinjaman, dengan begitu jumlah kumulatif pinjaman daerah hanya berasal dari nilai pinjaman melalui obligasi yang akan diterbitkan. Pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi harus memiliki jumlah kumulatif pinjaman tidak melebihi 75% penerimaan umum APBD.

c. Belum pernahnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan pinjaman juga memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan DSCR. DSCR memperhitungkan nilai kewajiban jatuh tempo daerah baik yang berasal dari pinjaman lama maupun pinjaman baru. Berdasarkan hasil simulasi perhitungan yang dilakukan dengan asumsi kebutuhan pinjaman sebesar Rp.116.000.000.000,00 dalam bentuk obligasi berumur 5 tahun dengan bunga 8,25 % maka didapat nilai DSCR sebesar 2,84 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu lebih dari atau sama dengan 2,5.

d. Berdasarkan LRA 2012 – 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu menghasilkan surplus atas APBD, dengan kata lain daerah selalu memenuhi ketentuan batas maksimal defisit yang ditentukan pemerintah pusat setiap tahun. Pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi tidak boleh melebihi Batas Maksimal Defisit APBD yang telah ditetapkan

5. Berdasarkan 4 kriteria tersebut maka ditinjau dari aspek keuangan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah siap untuk menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggung Jawaban Obligasi Daerah sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 180 tahun 2015.

6. Pertumbuhan pendapatan yang selalu mengalami tren positif dari tahun ke tahun menjadi gambaran kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi keuangannya. Hal ini dapat menjadi citra positif untuk obligasi yang akan diterbitkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka berikut ini penulis mengajukan saran sebagai bentuk implikasi dari penelitian yang telah penulis lakukan, untuk menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan sumber pembiayaan yang besar maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat memanfaatkan peluang penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

2. Melihat besarnya potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata sejarah yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat memanfaatkan peluang penerbitan obligasi ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur objek-objek wisata.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat menggunakan aspek penilaian lebih luas dalam mengukur kesiapan seperti rencana investasi, kesiapan organisasi pelaksana dan lainnya.

